



**EVALUASI KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN
LAMONGAN ATAS PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PUSKESMAS DI
KECAMATAN PACIRAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Administrasi Publik

Oleh

AHMAD BAHRUDDIN HARIYANTO

NPM 21901091113



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2020**

RINGKASAN

Ahmad Bahruddin Hariyanto, Npm 21901091113, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Evaluasi Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Atas Pembagian Wilayah Kerja Puskesmas Di Kecamatan Paciran Dosen Pembimbing I: Dr. Khoiron, S.AP., M.IP. Dosen pembimbing II: Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan evaluasi kebijakan Dinas Kesehatan dalam pembagian wilayah kerja puskesmas di Kecamatan Paciran. Hadirnya kebijakan pembagian wilayah kerja dalam dunia pemerintahan di Kabupaten Lamongan menjadi salah satu Langkah strategis pemerintah dalam menciptakan dunia pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa maupun fenomena yang terjadi dilapangan. Fokus penelitian berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pembagian wilayah kerja dan juga evaluasi kebijakan dengan menggunakan tahapan model evaluasi menurut Lester dan Stewart ada Empa telemen untuk mengevaluasi kebijakan yakni Pengkhususan, Pengukuran, Analisis dan Rekomendasi.

Hasil yang diperoleh diketahui bahwasanya, dalam pelaksanaan pembagian wilayah kerja tidak selalu berjalan dengan baik seperti halnya yang terjadi di lapangan bahwasanya ada beberapa masyarakat yang kurang puas atas kebijakan ini. Ada beberapa poin dalam kebijakan ini yang dapat dievaluasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan ini di kemudian hari. Seperti halnya apakah kebijakan ini sudah efektif menimbang ada banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat atas ketidakpuasan kebijakan ini, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang menerima informasi yang akurat, yang kedua kurangnya fasilitas yang memadai, hal ini juga mempunyai peran penting dalam mendukung kebijakan tersebut. Dan yang terakhir yakni kualitas pelayanan yang dirasa masih belum memuaskan masyarakat.

Melalui proses evaluasi yang telah dilakukan ditemukan beberapa rekomendasi dan saran yang dapat peneliti berikan yakni dengan optimalisasi proses sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Paciran sehingga kehadiran kebijakan ini lebih dikenal dan dapat dimaksimalkan. Selain itu perbaikan serta penambahan fasilitas juga menjadi salah satu saran agar dapat menunjang kebijakan pembagian wilayah kerja. Dan yang terakhir yakni memperbaiki pelayanan, hal ini yang terpenting karena kepuasan masyarakat didapatkan atas pelayanan yang di berikan

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Puskesmas, Pembagian Wilayah Kerja

SUMMARY

Ahmad Bahruddin Hariyanto, Npm 21901091113, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang. Policy Evaluation of the Lamongan District Health Office on the Division of Work Areas for Community Health Centers in Paciran Sub-District Advisory Lecturer I: Dr. Khoiron, S.AP., M.IP. Supervisor II: Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int

This study aims to identify and describe the policy evaluation of the Health Service in the distribution of work areas for puskesmas in Paciran District. The presence of a policy on the division of work areas in the world of government in Lamongan Regency is one of the government's strategic steps in creating an effective, transparent and accountable government.

The research method used in this study is descriptive qualitative which is used to describe events and phenomena that occur in the field. The focus of research relates to the implementation of the policy on the division of work areas and also the evaluation of policies using the stages of the evaluation model according to Lester and Stewart there are four elements for evaluating policies, namely Specialization, *Measurement*, Analysis and Recommendations.

The results obtained show that the implementation of the division of work areas does not always go well as is the case in the field, in fact there are some people who are dissatisfied with this policy. There are several points in this policy that can be evaluated for improvement in the implementation of this policy in the future. As well as whether this policy has been effective considering there are many complaints submitted by the public regarding dissatisfaction with this policy, the lack of outreach to the community so that the community does not receive accurate information, secondly the lack of adequate facilities, this also has an important role in supporting the policy. And the last is the quality of service that is felt to still not satisfy the community.

Through the evaluation process that has been carried out, several recommendations and suggestions were found that the researcher could provide, namely by optimizing the socialization process for the people of Paciran District so that the presence of this policy is better known and can be maximized. In addition, repairs and additions to facilities are also one of the suggestions in order to support the policy of dividing work areas. And the last one is improving service, this is the most important thing because community satisfaction is obtained for the services provided.

Keywords: Evaluation, Policy, Community Health Center, Division of Work Areas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya pembangunan nasional yaitu pembangunan kesehatan, yang mana ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan pola hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan kesehatan dengan memiliki kontribusi sebesar 80% dari semua faktor yang berhubungan dengan pembangunan kesehatan (Peraturan Presiden RI No. 72 Tahun 2012). Tujuan pembangunan kesehatan sebagai komitmen nasional dapat dilihat pada pasal 3 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 (Undang-Undang Kesehatan) yang menyatakan bahwa: “Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (UU Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan)

Sejak masa reformasi sampai saat ini Pemerintah Daerah mendapatkan keuntungan dengan adanya otonomi daerah dimana pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi, keadaan dan kebutuhan daerah tersebut (Sakinah Nadir 2013:01). Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat Indonesia yakni di

setiap kecamatan didirikan instansi pemerintah sebagai unit penyelenggara kesehatan masyarakat, yaitu Puskesmas atau bisa disebut juga dengan Pusat Kesehatan Masyarakat dimana peran Puskesmas ini menjadi pusat pertolongan pertama bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Menurut Budiarto (2015:05) secara umum, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas meliputi pelayanan *kuratif* (pengobatan), *preventif* (upaya pencegahan), *promotif* (peningkatan kesehatan) dan *rehabilitasi* (pemulihan kesehatan). Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Irwanashari dalam jurnalnya Th. A. Radito (2014:12). Menurutnya pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Untuk mencapai level kesehatan masyarakat yang tinggi melalui upaya kesehatan yang digunakan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) maka perlu adanya kualitas pelayanan kesehatan yang berkualitas oleh pelaksana kesehatan itu sendiri. (Peraturan Menteri Kesehatan 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas): Puskesmas mempunyai peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berada di wilayah pedesaan dan pinggiran kota.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan jumlah penduduk Kabupaten Lamongan Pada Tahun 2020 tercatat sebesar 1.189.380 Jiwa dengan jumlah Laki-laki sebanyak 578.113 jiwa dan Perempuan 611.267 jiwa. Puskesmas

yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Puskesmas Paciran 2117,7 jiwa. (Profil Kesehatan, 2020:05). Maka dari itu di wilayah kecamatan paciran dengan Surat Keputusan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor Surat Keputusan 188/946/Kep/413.111/2019 menginstruksikan bahwa memberikan izin operasional Puskesmas Tlogosadang sebagai Puskesmas Induk Ke 2 dan membawahi 2 Puskesmas pembantu.

Tujuan didirikan lagi sebuah Puskesmas Tlogosadang dengan harapan bisa mengurangi bobot kerja dari Puskesmas Paciran dengan sistem pembagian wilayah kerja maka demikian masyarakat mendapatkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Dapat diketahui bahwa salah satu kebijakan yang sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah kebijakan pembagian wilayah kerja. Maka dari itu dengan luas wilayah Kecamatan Paciran 70,21 Km dengan 16 Desa dan 1 kelurahan (BPS. Kab. Lamongan, 2021:12). Dengan letak Puskesmas Paciran terletak di wilayah bagian barat Kecamatan Paciran dan Jumlah masyarakat Kecamatan Paciran sebanyak 2117,7 jiwa (Profil Kesehatan, 2020:05). Maka perlu adanya kebijakan tentang pembagian wilayah kerja puskesmas dengan harapan bisa mengurangi bobot kerja dari Puskesmas Paciran dengan sistem pembagian wilayah kerja maka demikian masyarakat bisa mendapatkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Pembagian wilayah kerja Puskesmas juga terjadi di beberapa Kecamatan diantaranya yaitu di Kecamatan Paciran, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Modo, Kecamatan Sukodadi dengan 2 Puskesmas Induk, dan Kecamatan Babat sebanyak 3 Puskesmas Induk (Profil Kesehatan Kab. Lamongan 2020:08). Ini menandakan bahwa beberapa wilayah Kecamatan yang

tingkat aktivitas masyarakatnya tinggi. sehingga perlu dibagi wilayah kerja puskesmas guna untuk mengurangi bobot kerja dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat dan yang terbaik.

Pada tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan kebijakan bahwa pembagian wilayah kerja puskesmas dengan bukti Surat Keputusan menginstruksikan bahwa Puskesmas Tlogosadang dapat menjalankan pelayanan sebagai Puskesmas induk ke 2 di Kecamatan Paciran dengan pertimbangan bahwa luas wilayah Kecamatan Paciran, Jumlah penduduk dan Kapasitas Puskesmas Paciran. Dengan demikian Puskesmas Tlogosadang ditunjuk untuk menjadi Puskesmas induk ke 2 di Kecamatan Paciran, dengan harapan pelayanan kesehatan di Kecamatan Paciran ini dapat merata dan dapat memudahkan masyarakat untuk menggunakan jasa pelayanan kesehatan tersebut. Adapun jarak dari Puskesmas Paciran dengan Puskesmas Tlogosadang ini 11 KM.

Semenjak kebijakan ini diberlakukan mulai dari tahun 2019 sampai saat ini kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas ini justru menuai hal negatif dari masyarakat, dikarenakan Puskesmas Tlogosadang belum siap menjadi puskesmas induk ke 2 di Kecamatan Paciran dikarenakan kualitas pelayanan, kualitas kesehatan dan fasilitas yang dirasa kurang memadai. Hal ini diperkuat dengan bukti penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Muhammadiyah Gresik dengan judul “Tingkat Kepuasan Pelayanan Pasien Rawat Jalan BPJS di Instalasi Farmasi Puskesmas Tlogosadang Kabupaten Lamongan” (Laksana, 2021). Hasil dari penelitian jurnal ini menggunakan 5 dimensi ada beberapa dimensi dimana masyarakat merasa puas tetapi juga ada yang kurang puas atas pelayanan ini dimana

kalau di presetasikan masyarakat yang tidak puas 66% dan 56%. Adapun dimensi yang masyarakat tidak puas adalah kemampuan (berhubungan dengan kemampuan petugas kesehatan dan petugas administrasi yang dinilai kurang oleh masyarakat) dan Bukti fisik (berhubungan dengan fasilitas atau infrastruktur), dimana dua dimensi ini sangatlah penting dalam pelayanan kesehatan.

Kebijakan pembagian wilayah kerja Puskesmas di Kecamatan Paciran ini menjadi serangan balik bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dimana tidak di iringi dengan pemerataan pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan fasilitas puskesmas yang baik. Maka sewajarnya masyarakat mengeluhkan atas kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas ini. Aksi protes ini biasanya ditujukan kepada petugas Puskesmas Tlogosadang mengenai tentang sarana yang kurang memadai, keterlambatan pelayanan dan penanganan, persediaan obat, peralatan medis dan lain-lain. Permasalahan ini juga dibuktikan dari berita yang dikeluarkan langsung oleh website yang dikelola Puskesmas Tlogosadang. Berita berupa foto rekapitulasi hasil evaluasi kepuasan pasien dan respon Puskesmas Tlogosadang, Adapun juga didalam laporan ini ditulis pengajuan untuk pembangunan puskesmas serta penambahan tenaga kesehatan.

Pada awalnya sebelum tahun 2019 dengan sebelum diberlakukannya kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas di Kecamatan Paciran ini masyarakat bebas berobat kemana saja terutama ke Puskesmas Paciran yang masyarakat anggap Puskesmas Paciran sudah mempunyai kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan fasilitas yang sudah memadai untuk ukuran Puskesmas. sedangkan Menurut Sandrayati Moniaga, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas Ham RI,

dalam media komnasham.go.id, 7 Januari 2021 pada acara Pra-Festival HAM 2022 mengatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Salah satu didalamnya adalah hak atas pelayanan kesehatan”.

Dari kutipan ini dapat diketahui bahwa setiap masyarakat bebas untuk berobat kemana saja dan memilih Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang dimana mereka anggap memiliki kualitas pelayanan yang terbaik dan dengan jangkauan harga lebih murah. Kebijakan ini kurang tepat untuk diterapkan di wilayah kecamatan paciran dimana seharusnya sebelumnya pemerintah mengkaji terlebih dahulu bagaimana kualitas pelayanan di Puskesmas Tlogosadang dan bagaimana fasilitas yang ada, sedangkan di kecamatan paciran sendiri terdapat banyak Rumah Sakit swasta yakni RS. Suyudi, RS Arsy.

Dengan adanya keluhan ketidakpuasan masyarakat atas kebijakan pembagian wilayah kerja ini maka Pemerintah Kabupaten Lamongan mulai berbenah dengan membuat program baru dan memulai pembangunan. diharapkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat meningkat sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai setinggi-tingginya (Profil Kesehatan, 2023:01). Pembagian wilayah kerja puskesmas merupakan upaya untuk memastikan Setiap masyarakat di suatu wilayah tertentu memperoleh akses pelayanan kesehatan yang memadai. Namun, dalam penerapannya, sering kali terjadi kendala dalam pembagian wilayah kerja Puskesmas yang bisa mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Adapun beberapa permasalahan yang sering terjadi adalah tumpang tindihnya wilayah kerja antar puskesmas, wilayah kerja yang

terlalu luas sehingga petugas kesehatan kesusahan untuk menjangkau masyarakat, dan perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam satu wilayah kerja yang dapat mempengaruhi akses pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kebijakan pembagian wilayah kerja Puskesmas untuk menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Evaluasi kebijakan ini dapat memberikan gambaran tentang permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan pembagian wilayah kerja Puskesmas, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut.

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Berkaitan dengan topik yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini maka perlu didukung dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang sejenis (Randi, 2018:15).

Sebagai bahan pertimbangan dan acuan agar penelitian ini dapat dibandingkan dan melengkapi penelitian yang lain pada tema yang sama, maka penelitian terdahulu yang dijadikan acuan atau referensi dalam penelitian ini sebagai pembeda, pendukung serta tambahan untuk menganalisis kajian perbedaan maupun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Selama ini penelitian tentang

kebijakan pemerintah sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu tetapi masih sedikit yang membahas tentang evaluasi pembagian wilayah kerja puskesmas tentunya fenomena ini sangatlah jarang terjadi tergantung sesuai kebutuhan daerah masing masing. Peneliti menggunakan acuan penelitian terdahulu untuk menjadi tolak ukur peneliti untuk menulis dan menganalisis suatu penelitian. Penelitian terdahulu ini merupakan sebuah pencarian yang dilakukan peneliti terhadap berbagai literatur penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti. Adapun tema yang diangkat oleh peneliti yaitu, Kebijakan Pemerintah atas pembagian wilayah kerja Puskesmas Paciran sedangkan fokus peneliti sendiri yakni berfokus kepada evaluasi kebijakannya.

Berdasarkan pencarian yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai kesamaan tema dengan topik skripsi ini. Adapun penelitian yang pertama dilakukan oleh Habibi ditahun 2022. Yang melakukan penelitian dengan judul “Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Pembagian Wilayah Kerja (Studi Kasus Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi)” yang membahas bagaimana pembagian tugas antara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jambi dengan DKP Kabupaten/Kota, setelah diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014. Karena Undang-Undang ini menginstruksikan banyaknya tugas dan tanggung jawab DKP Kabupaten/Kota beralih menjadi tanggung jawab DKP Provinsi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implikasi diterbitkannya

UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. (Habibi, 2020).

Selanjutnya, Kania dkk pada tahun 2019. dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di UPTD Pasar Cisurupan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut”. Berdasarkan PERDA Kabupaten Garut No 2 Tahun 2009. Pasar Cisarupan merupakan pasar tradisional tipe B yang lokasinya berada di Ibu Kota Kecamatan Cisarupan dengan jenis dagangannya kurang lengkap dibandingkan pasar tipe A. secara teknis Pasar Cisarupan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibawah pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Garut dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pasar Cisarupan termasuk kedalam organisasi pemerintah. Sebagai suatu organisasi, pihak pengelola Pasar Cisarupan juga harus memperhatikan bagaimana pembagian kerja pegawai dan sejauh mana kinerja pegawainya. (Kania, 2019).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nohabrilyanti di tahun 2009. dengan judul “Efek Pembagian Wilayah Kerja Kader Posyandu Terhadap Cakupan Imunisasi (Suatu Usaha Pencapaian Desa UCI Di Wilayah Kerja Puskesmas Arjasa)”. Penelitian ini membahas tentang pembagian wilayah kerja kader posyandu dimana ini merupakan salah satu ujung tombak untuk mencapai derajat kesehatan setinggi tingginya. Maka dari itu pengelolaan manajemen sangatlah diperlukan akan tidak terjadi tumpang tindih dalam pembagian tugas kader, pengelolaan manajemen yang baik dapat menyebabkan tujuan dari program

tercapai. Salah satu perbaikan manajemen kesehatan salah satunya yaitu pembagian wilayah kerja kader posyandu, sehingga akan membawakan hasil yang lebih baik dalam mencapai desa UCI (*Universal Child Immunization*) (Nohabrilyanti, 2009).

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa pembagian tugas wilayah kerja ini masih diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Melalui kebijakan pemerintah atau dipelopori oleh fenomena sosial demi membangun kesejahteraan rakyat itu sendiri. Seperti contoh penelitian terdahulu dari Habibi di tahun 2022. Dimana setelah disahkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas lagi kepada Pemerintah Provinsi (Dinas Kelautan dan Perikanan) untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan termasuk pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya laut berdasarkan potensi yang dimilikinya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kania dkk pada tahun 2019. Hasil dari penelitian ini membahas tentang bentuk manajemen yang baik itu bergantung kepada kinerja pegawainya yang mengelola organisasi, baik dan buruknya kinerja pegawai dalam suatu organisasi publik maupun swasta ini bisa dipengaruhi oleh pembagian kerja pegawainya, dikarenakan untuk mengisi suatu posisi jabatan di organisasi harus sesuai dengan kemampuan dan keterampilan, hal tersebut sebagai langkah awal untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nohabrilyanti ditahun 2009. Dimana untuk mencapai tingkat kesehatan yang tinggi maka pembagian wilayah kerja ini sangatlah diperlukan agar dapat cepat untuk menyelesaikan target dan tidak tumpang tindih di antara pegawai satu dengan yang lainnya. Peneliti membuat

kesimpulan berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan bahwa penelitian yang dilakukan kali ini tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dimana ada beberapa penelitian terdahulu sama sama membahas tentang kebijakan pembagian wilayah kerja yang dimana fokus dari peneliti ini di evaluasi kebijakannya, Adapun variabel penelitian, dan adapun teori yang sama digunakan peneliti sama dengan penelitian sebelumnya.

Dengan narasi *Empirical Problem* dan keresahan masyarakat atas ketidakpuasan dengan kebijakan tersebut pembagian wilayah kerja Puskesmas di Kecamatan Paciran. hal ini menjadi dasar peneliti sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertarik untuk melakukan kajian ilmiah secara mendalam mengenai Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan atas Pembagian Wilayah Kerja Puskesmas di Kecamatan Paciran.

Adapun elemen evaluasi kebijakan menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2004:229). ada 4 (Empat) unsur atau elemen yang harus diperhatikan dalam menyusun standar evaluasi kebijakan, yaitu Pengkhususan (*Spesification*), Pengukuran (*Measurementt*), analisis dan rekomendasi. Pengkhususan (*Spesification*) ini merupakan kegiatan yang paling penting dari kegiatan lain dalam evaluasi kebijakan. Kegiatan ini meliputi identifikasi tujuan atau kriteria dengan nama program kebijakan yang akan dievaluasi. Disamping itu kriteria yang akan digunakan untuk menilai manfaat dari kebijakan yang dilaksanakan. Pengukuran (*Measurementt*) adalah pengukuran terkait aktivitas pengumpulan informasi yang relevan dengan objek evaluasi. Analisis merupakan penggunaan informasi yang dikumpulkan untuk menyusun kesimpulan. Rekomendasi, pada kegiatan ini

menjadi penentu mengenai apa yang harus dilaksanakan di masa depan. Dalam kegiatan ini dapat diketahui keputusan yang tepat yang harus dilakukan dan di ambil untuk jangka panjang setelah melihat proses dari evaluasi sebelumnya.

1.3 Permasalahan

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas, maka pokok yang akan di telaah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk penelitian yaitu “Bagaimana Evaluasi Kebijakan Kesehatan tentang Pembagian Wilayah Kerja Puskesmas di Kecamatan Paciran?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan penulis, maka dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian ini adalah menjawab terhadap rumusan masalah yang ada, yaitu mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Evaluasi Kebijakan dari Dinas Kesehatan, Atas Pembagian Wilayah Kerja Puskesmas di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

1.5 Manfaat Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah, pokok masalah, dan tujuan penelitian, adapun manfaat dilakukan penelitian ni terdiri atas dua manfaat terhadap dunia kepentingan dunia praktis dan akademik, adapun manfaat tersebut adalah:

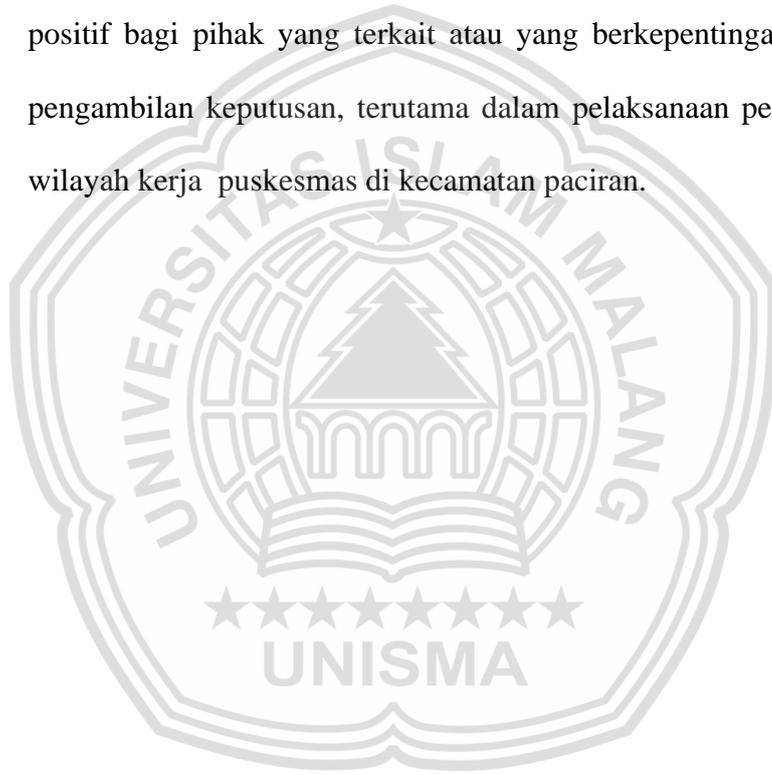
1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi yang berkepentingan dan menjadi tambahan wawasan yang berkepentingan

khususnya yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan, serta sebagai bentuk kontribusi dalam Ilmu Administrasi Publik.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi dunia pendidikan, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait dengan Evaluasi Kebijakan
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang positif bagi pihak yang terkait atau yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pelaksanaan pembagian wilayah kerja puskesmas di kecamatan paciran.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan selama empat tahun sejak 2019 dapat dikatakan berjalan dengan baik akan tetapi belum mencapai pada kata maksimal. Dalam proses pemberian pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang kesehatan seharusnya dapat maksimal. Dari proses evaluasi yang dilakukan oleh peneliti inilah diharapkan memberikan perbaikan akan berjalannya kebijakan ini. Dari penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pembagian wilayah kerja puskesmas di Kecamatan Paciran meliputi :

- a) Evaluasi kebijakan Dinas Kesehatan atas pembagian wilayah kerja Puskesmas di Kecamatan Paciran.

Dalam penelitian mengenai evaluasi kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas di kecamatan paciran ini, dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi menurut Lester dan Stewart dalam bukunya Budi Winarno pada tahun 2014 dengan 4 elemen tahapan evaluasi yaitu :

1. Pengkhususan (*Specification*)

Kriteria yang ditentukan oleh peneliti ialah pada tujuan diterapkannya program kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas di Kecamatan Paciran dan umumnya di Kabupaten Lamongan dengan harapan meratanya pelayanan kesehatan, terpenuhinya standar pelayanan publik yang mudah dan cepat.

2. Pengukuran (*Measurement*)

Ditemukan bahwasanya pelaksanaan kebijakan pembagian wilayah ini merupakan inovasi dan terobosan baru dalam bidang pelayanan publik untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat sesuai dengan program Bupati Lamongan, serta menjadikan seimbang bobot kerja yang diterima pihak puskesmas sehingga akan mempercepat dalam merespon keluhan atau kebutuhan pelanggan yakni masyarakat

3. Analisis

Ditemukan alasan bahwasanya adanya ketidakpuasan beberapa masyarakat mengenai pembagian wilayah kerja ini yakni kurangnya informasi dan sosialisasi yang didapat oleh masyarakat yang seakan akan kebijakan ini belum siap diterapkan di Kecamatan Paciran. Selanjutnya yang mempengaruhi kepuasan masyarakat yakni mengenai pelayanan dan fasilitas yang dirasa belum memadai sebagai puskesmas induk kedua, dimana pola kehidupan masyarakat wilayah timur di Kecamatan Paciran selalu mendapatkan pelayanan yang baik dan ditunjang dengan fasilitas yang memadai.

4. Rekomendasi

pada poin ini berisikan rekomendasi perbaikan terkait dengan permasalahan yang ada. Sosialisasi lanjutan terkait kehadiran kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas sehingga masyarakat tidak bingung lagi ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Serta pembangunan fasilitas baru demi menunjang pelaksanaan kebijakan ini sehingga memberikan kesan

kepuasan masyarakat yang lebih baik. Hal ini menjadi poin utama untuk perbaikan penerapan kebijakan pembagian wilayah kerja secara lebih baik lagi

5.2 Saran

Setelah pelaksanaan proses evaluasi pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan kabupaten lamongan mengenai pembagian wilayah kerja puskesmas di Kecamatan Paciran, diharapkan adanya perbaikan untuk memperbaiki beberapa permasalahan yang muncul pada saat penerapan program kebijakan ini. Diharapkan dengan adanya evaluasi serta perbaikan ini memberikan masukan yang positif kepada instansi yang terkait agar dapat maksimal memberikan pelayanan serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan sehingga terciptanya kualitas kesehatan yang baik.

Adapun saran yang mungkin bisa peneliti berikan dan bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pembagian wilayah kerja ini untuk kedepannya adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan proses sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat Kecamatan Paciran. Proses evaluasi dapat dilaksanakan dengan seluruh elemen Pemerintah atau Stakeholder di Kecamatan Paciran. diharapkan dengan adanya sosialisasi ini memberikan informasi atau treatment lebih kepada masyarakat dalam mendapatkan kesehatan yang baik
- b. Memperhatikan pembangunan fasilitas. Dimana yang masyarakat nilai pertama sebelum pelayanan yakni bukti fisik bangunan yang ada di puskesmas tersebut. Jika fasilitas yang memadai masyarakat juga merasa terpuaskan oleh fasilitas yang ada

- c. Meningkatkan kualitas pelayanan. Faktor terpenting dalam implementasi kebijakan ini yakni tentang pelayanan. Pelayanan ini bersentuhan langsung kepada masyarakat sehingga pelayanan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh para petugas kesehatan. Pelayanan juga berhubungan langsung kepada kepuasan pelanggan atau masyarakat.
- d. Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali mengenai faktor-faktor kebijakan pembagian wilayah kerjake puskesmas.
- e. Hendaknya para peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian, mengingat penelitian yang dilaksanakan belum sepenuhnya bisa menggambarkan kondisi dilapangan terhadap kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas
- f. Terakhir saran terhadap skripsi yang peneliti tulis ialah, penelitian ini belum komprehensif, karena hanya melihat kebijakan pembagian wilayah kerja dari segi evaluasi saja maka untuk penelitian selanjutnya tentang kebijakan pembagian wilayah kerja puskesmas bisa memperluas dan memperdalam mengenai kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahab, Solichin (2008) *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal. (2002) *Kebijakan Publik*. Jakarta, Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. (2014) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung, CV Alfabeta.
- Akbar, Mohi. (2018) *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan Di Indonesia)*. Gorontalo, Ideas Publishing.
- Alamsyah, Kamal. (2016) *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Bandung, Media Citra Mandiri Press.
- Arikunto, S. (2002) *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta, Bumi Aksara.
- B Miles, Matter, Huberman Dan Saldana. (2014) *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta, UI Press
- Bogdan Dan Taylor. (1975) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remadja Karya.
- BPS Kab. Lamongan. (2021) *Kecamatan Paciran Dalam Angka*. Lamongan, CV. Azka Putra Pratama Surabaya.
- Budiarto. (2015) *Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Kecamatan Enrekang*. Universitas Hasanudin.
- Dunn, William N. (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Edi, Suharto. (2005) *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosa*. Bandung, PT. Refka Aditama.
- Fredy S. Nggao. (2003) *Evaluasi Program*. Jakarta, Nyansa Mandiri.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2015) *Manajemen Dasar, pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta, Bumi Aksara.
- Moleong, L.J. (2011) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung, Pt. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. (2016) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Pt. Remada Rosdakarya.

- Moleong, Lexy. (2005) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (1998) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Tarsito.
- Nazir. (1998) *Metode Penelitian*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. (2009) *Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang (model-model Perumusan implementasi dan evaluasi)*. Jakarta, PT.Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. (2012) *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta, Alfabeta.
- Raco, J. R. (2010) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Grasindo
- Sugiyono. (2008) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017) *Metode penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung, CV. Alfabeta
- T.Bintoro. (1998) *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta, LP3S
- Thoha, M. (2012) *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. (2004) *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Media Pressindo

Jurnal Atau Skripsi:

- Habibi. (2022) *implikasi penerapan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah terhadap pembagian wilayah kerja (Studi kasus dinas kelautan dan perikanan provinsi jambi*. Skripsi Universitas Islam Negeri sulthan thaha Saifuddin: Jambi
- Hidayat, Taufik (2020) *Profil Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2020*. Lamongan.
- Kania, widiawati (2019) *Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di UPTD Pasar Cisurupan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut*. Jurnal. Pembangunan dan kebijakan publik, 10, pp. 1–3.
- Laksana, tiadeka, rivai (2021) ‘Tingkat Kepuasan Masyarakat Pasien Rawat Jalan BPJS Di Instalasi Farmasi Puskesmas Tlogosadang Kabupaten Lamongan, Universitas Muhammadiyah Gresik’, Jurnal. HERCLIPS (journal of herbal,

clinical an pharmaceufical sciences, 03(01), pp. 11–12. Available at: <http://journal.umg.ac.id/index.php/herclips/index> (Accessed: 19 July 2023).

Nadir, S. (2013) *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal. politik propetik, 1(1), pp. 1–5.

Noharbrilyanti, intan (2009) *efek pembagian wilayah kerja kader posyandu terhadap cakupan imunisasi (suatu usaha pencapaian UCI di wilayah kerja puskesmas Arjasa)*. Skripsi. Universitas Jember.

Radito, A.T. (2014) *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Puskesmas*. Jurnal. ilmu manajemen, 11(2), pp. 14–15.

RANDI, S.B. (2018) *Perbaikan Proses Layanan Resto Dengan Menggunakan Qfd (Quality Function Deployment) Dan Internal Benchmarking Pada Kober Mie Setan Gresik*. Jurnal. kualitas pelayanan, 1, pp. 15–15.

Internet :

Komnas Ham. 2021. “Menyoal Pentingnya Hak atas Kesehatan”, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/1/7/1643/menyoal-pentingnya-hak-atas-kesehatan.html>, Diakses pada tanggal 24 Desember 2022

Puskesmas Tlogosadang. 2019. “Terimakasih atas saran dan kritikan anda berikut hasil tindak lanjut keluhan anda di tahun 2019”, <http://pusktlogosadang.blogspot.com/2020/09/terimakasih-atas-saran-dan-kritik-anda.html?m=1>. Diakses pada Tanggal 25 Desember 2022

Puskesmas Tlogosari. 2022. “Peresmian Gedung Poned Puskesmas Tlogosadang”, <https://lamongankab.go.id/beranda/dinkes/post/8214>. Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2022

<https://www.indonesia-tourism.com/east-java/tourism/lamongan/map/lamongan-map.png>

Peraturan atau Perundang Undangan :

Peraturan Menteri Kesehatan 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas

Peraturan Presiden RI. (2012). Peraturan Presiden RI No. 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

SK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor SK
188/946/Kep./413.111/2019 Perizinan Puskesmas Tlogosadang Sebagai
Puskesmas Induk Ke 2

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan

